



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVAWANY YUNITA ARITONANG
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR I
3. NHK : 835900

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.230.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/36 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah Seluas 435 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 283.000.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 950.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.513.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.513.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.